

RENCANA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
SURAT PERNYATAAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPUPR	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPUPR.....	9
2.2. Sumber Daya PD	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPUPR.....	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPR.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.5. Penentuan Isu-isu Stategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPR.....	51
4.2. Tujuan	51
4.3. Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	84
BAB VIII PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.....	16
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Golongan...	16
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	17
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024	21
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024	22
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	43
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	45
Tabel 3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
Tabel 4.2	Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis terhadap Tujuan dan Sasaran DPUPR Tahun 2019–2024	53
Tabel 4.3	Formulasi dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPUPR Tahun 2019–2024	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	57
Tabel 5.2	Program/Kegiatan dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal	60

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024.....	69
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	85
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	85
Tabel 7.3	Definisi Operasional, Formulasi dan Komponen Pembentuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 yang Mengacu pada RPJMD 2019-2024	87
Tabel 7.4	Definisi Operasional, Formulasi dan Komponen Pembentuk Indikator Program	91



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno – Hatta No. 6, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511

Telp (0293) 788186, Fax (0293) 788186

Website : www.dpupr.magelangkab.go.id Email : dpupr@magelangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : David Rudiyanto, S.T., M.T.

NIP : 19680511 199803 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/25/KEP/22/2020 tanggal 28 Februari 2021

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

Berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 6 Kota Mungkid Kabupaten Magelang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Perubahan Renstra DPUPR disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19680511 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, dan dampak pandemi Covid-19, serta berdasarkan hasil evaluasi Renstra DPUPR Tahun 2019-2024 maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Renstra DPUPR Tahun 2019 - 2024. Dan mengacu surat dari Sekretaris Daerah Nomor. 050/442/24/2021 Tanggal 3 Maret 2021 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah dan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021 serta berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Rancangan Awal Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada tahun 2024, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Magelang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada tahun 2024.

Adapun keterkaitan dokumen Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

Keterkaitan Renstra DPUPR dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu arah kebijakan Kementerian PUPR Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional.

Keterkaitan dengan RPJMD bahwa Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan indikator sasaran PD dan telah dilakukan upaya untuk mencapai indikator tersebut, meliputi:

1. Pembangunan jalan dan jembatan berupa pembangunan jalan yang semula panjang jalan kabupaten meliputi 887,83 km menjadi 1000,83 km pada tahun 2016; pembangunan bangunan pelengkap jalan meliputi jembatan, trotoar, drainase, dan tanggul penahan jalan; serta peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 mampu meningkatkan proporsi jalan kabupaten kondisi baik dari 65,32% menjadi 74,17% pada tahun 2018;
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui pengembangan jaringan irigasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2018 telah meningkatkan Persentase cakupan bangunan irigasi kabupaten kondisi baik dari 56,10% menjadi 65,93%; pembangunan 3 (tiga) embung guna mendukung ketersediaan air irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 di Desa Wanurejo, Losari, dan Sambak; dan pembinaan terhadap 103 kelompok petani pengelola air irigasi;

Perubahan Renstra DPUPR Kabupaten Magelang memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Propinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 secara bertahap, berkesinambungan yaitu melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah, meningkatkan layanan jaringan irigasi, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi. Serta Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan layanan infrastruktur dasar.

Dengan latar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang menyusun 1 Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 - 2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 23. Peraturan Menteri PUPR No 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2019 - 2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah DPUPR dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan di DPUPR.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019 - 2024.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Perubahan Renstra, fungsi Perubahan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan PD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD (SDM, aset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dan tahun 2019 - 2024 harus jelas menunjukkan yang menjadi cita-cita layanan terbaik PD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019 – 2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merumuskan indikator kinerja utama, indikator kinerja, definisi operasional, formulasi dan komponen pembentuk indikator program PD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Perubahan Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.

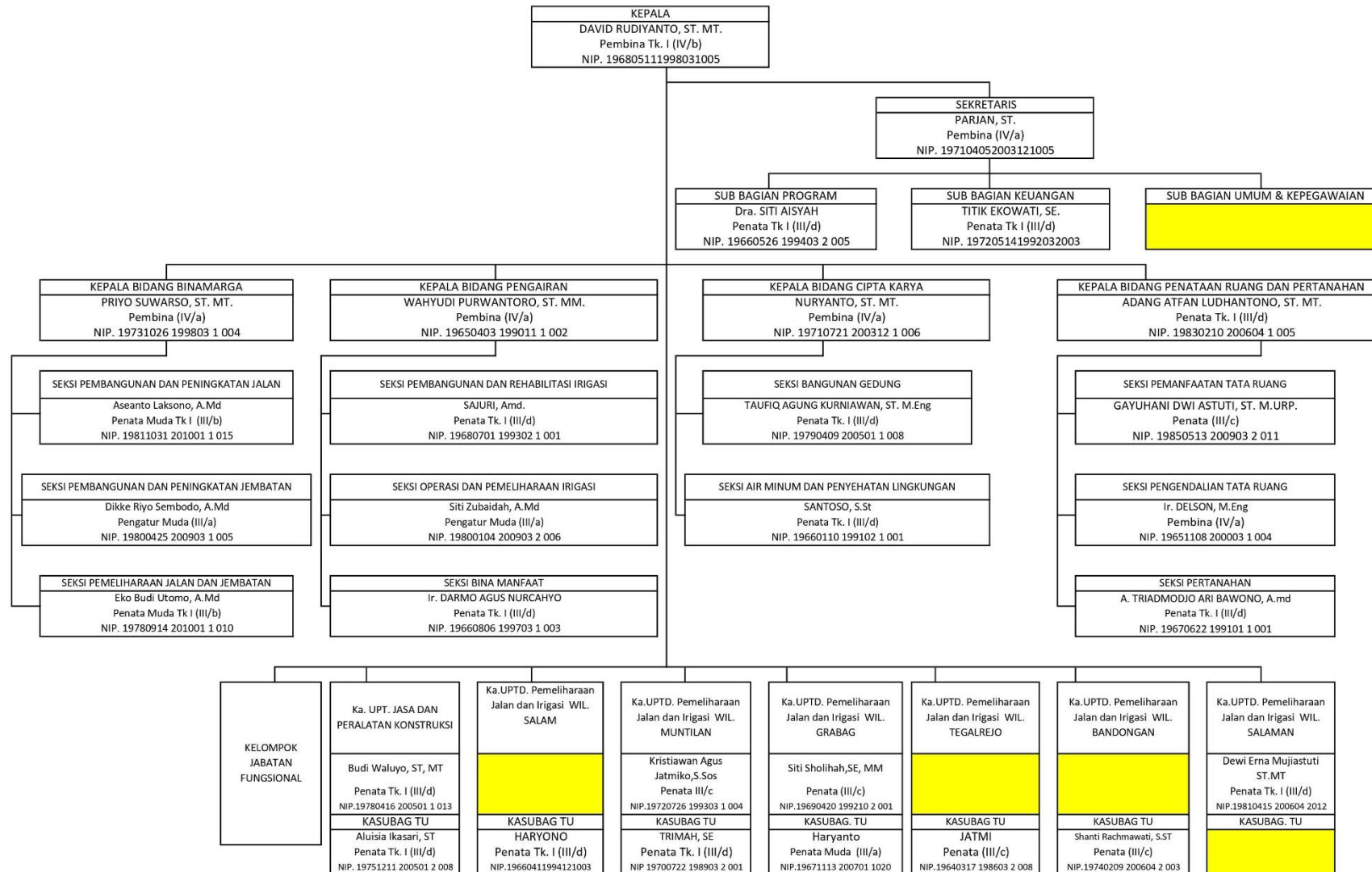
Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bina marga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengairan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penataan ruang dan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
- f. Menyelenggarakan kegiatan jaskon dan perbekalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 11 Kepala Seksi, 1 Kepala UPT Japerkon, 6 Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah, 1 Kepala Sub Bagian UPT Japerkon, dan 6 Kepala Sub Bagian UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah. Struktur organisasi perangkat daerah DPUPR adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG



Uraian tugas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas:

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan di bidang bina marga.
- f. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengairan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan di bidang cipta karya.
- h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan.
- i. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, dan bidang pertanahan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.

- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, dan bidang pertanahan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas: Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- d. Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- h. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- i. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.

- j. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- k. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- m. Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan.
- n. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- p. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- q. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal, karena dengan adanya sumber daya manusia

yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi sumber daya manusia yang ada dan membangun program pengembangan sumber daya manusia (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change*, sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*), keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of conduct*). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan sumber daya manusia menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan sumber daya manusia secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi sumber daya manusia yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar.

Memperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan sumber daya manusia yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi sumber daya manusia untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. Dengan kedudukan tersebut, sumber daya manusia menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek

organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi sumber daya manusia saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan sumber daya manusia yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan sumber daya manusia terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan sumber daya manusia dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang akan semakin mudah.

Dilihat dari jenjang pendidikannya, sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S1 dan S2 (21,23%), D3 (7,26 %), dan SLTA (49, 16%). Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S.2)	10	5.59%
2.	Sarjana (S.1)	28	15.64%
3.	Diploma 3/Akademi	13	7.26%
4.	SLTA	88	49.16%
5.	SLTP	30	16.76%
6.	SD	9	5.03%
JUMLAH		179	100

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

Sedangkan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepegawaian, mayoritas berada pada golongan II sebanyak 56,42%. Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	7	3.91%
2.	Golongan III	55	30.73%
3.	Golongan II	101	56.42%
4.	Golongan I	16	8.94%
JUMLAH		179	100

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

Sementara itu jika ditinjau dari sisi *gender*, maka Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang terdapat 153 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 17 pejabat struktural dan 136 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang yang terdiri dari 10 pejabat struktural dan 16 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Eselon	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	4		4
3.	Eselon IV	12	10	22
4.	Non Eselon	136	16	152
Jumlah		153	26	179

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana		Jumlah	Satuan
B	Peralatan dan Mesin			
	a	1) Ceketer	0	Unit
		2) Loader / wheel loader	1	Unit
		3) Mesin Gilas	20	Unit
		4) Wacker	3	Unit
		5) Pan Mixer	3	Unit
		6) Spryer	5	Unit
		7) Excavator Backhoe	1	Unit
		8) Backhoe Loader	1	Unit
		9) Vibro Roller	1	Unit
		10)Trailer	1	Unit
		11)Mesin Potong Rumput	31	Unit
	b	Alat Angkutan		
		- Kendaraan Dinas Roda Empat	11	Unit
		- Kendaraan Dinas Roda Enam	7	Unit
		- Kendaraan Dinas Roda Tiga	6	Unit
		- Kendaraan dinas roda dua	82	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
c	Alamat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Komputer	24	Unit
	- Laptop	36	Unit
	- Printer	30	Unit
	- Mesin Ketik	16	Unit
	- Meja	276	Unit
	- Kursi	260	Unit
	- Kursi Lipat	51	Unit
	- LCD Projector	8	Unit
	- Gps	20	Unit
- Kamera	17	Unit	
C	Bangunan dan Gedung		
-	Bangunan Kantor	13	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 1 indikator kinerja utama dan 14 indikator kinerja, dari 14 indikator tersebut yang mencapai target sebanyak 12 indikator kinerja dan 2 indikator kinerja belum mencapai dari target yang telah ditetapkan.

- Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja adanya perencanaan yang baik, pengawasan dan pekerjaan di lapangan sesuai dengan apa yang telah ditergetkan sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan mutu.
- Faktor yang memengaruhi adanya 2 indikator yang belum mencapai target:
 - Adanya *refocusing* anggaran karena wabah Covid-19
 - Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran turun diperubahan (DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi) waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi, waktu yang diperlukan 180 hari kalender sedangkan waktu yang tersisa hanya 120 hari kalender belum termasuk lelang.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang				66,51%	72,00%	78,75%	85,42%	92,27%	92,27%	69,90%	113,90%
1	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan				94,37%	95,77%	97,18%	98,59%	100,00%	100%	93,39%	98,96%
2	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik				77,71%	78,89%	80,08%	81,27%	82,47%	82,47%	77,74%	121,30%
3	Cakupan layanan jaringan irigasi				83,44%	85,25%	87,17%	88,88%	90,42%	90,42%	83,95%	111,27%
4	Cakupan layanan Sumber Daya Air				72,19%	74,20%	81,74%	83,74%	91,30%	91,30%	66,70%	101,20%
5	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik				99,25%	99,52%	99,73%	99,93%	100%	100%	99,05%	99,80%
6	Persentase terbangunnya Landmark				66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100%	100%	58,33%	87,49%
7	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik				12,50%	25%	50%	75%	100%	100%	0	0,00%
8	Cakupan layanan air minum **	√			88,79%	89,91%	91,03%	92,15%	93,27%	93,27%	89,03%	107,51%
9	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	√			87,70%	88,73%	89,76%	90,79%	91,82%	91,82%	100%	124,19%
10	Cakupan sarana prasarana ke PU-an				82,00%	86,00%	90,00%	95,33%	100%	100%	92,67%	113,01%
11	Cakupan layanan Jasa konstruksi				51,33%	62,95%	73,90%	88,05%	100%	100%	57,64%	112,29%
12	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan				39,49%	45,96%	52,57%	59,19%	65,80%	65,80%	50,65%	194,92%
13	Persentase kesesuaian tata ruang				42,39%	50,87%	59,34%	67,99%	76,64%	76,64%	69,5%	213,92%
14	Cakupan kinerja pertanahan				33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100%	100%	40%	120,01%

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Layanan Sumber Daya Air				NA	75,65	76,11	77,43	78,76	78,76		
2	Cakupan Layanan Air Minum***	√			NA	89,91	91,03	92,15	93,27	93,27		
3	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan				NA	0	0	50	100	100		
4	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik***	√			NA	88,73	89,76	90,79	91,82	91,82		
5	Cakupan Layanan Drainase Lingkungan				NA	0	0	39,03	100	100		
6	Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman				NA	100	100	100	100	100		
7	Cakupan Penataan Bangunan Gedung				NA	99,80	99,86	99,93	100	100		
8	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya				NA	100	100	100	100	100		
9	Cakupan Penyelenggaraan Jalan				NA	82,69	82,93	83,21	83,48	83,48		
10	Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi				NA	84,88	89,92	94,96	100	100		
11	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang				NA	50	66,67	83,33	100	100		
12	Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan				NA	100	100	100	100	100		

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.792.634.960	2.174.207.897	2.341.628.686	2.545.791.553	2.778.370.709	758.886.923		42%			
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	45.048.935	49.553.829	54.509.211	59.960.132	65.956.146	22.341.820		50%			
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	141.658.930	155.824.823	171.407.305	188.548.036	207.402.839	61.753.155		44%			
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	288.632.930	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	17.500.000		6%			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	296.781.300	344.459.430	378.905.373	416.795.910	458.475.501	269.228.148		91%			
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	993.767.865	1.093.144.652	1.202.459.117	1.322.705.028	1.454.975.531	388.063.800		39%			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	0	0	0	0	0						
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	26.745.000	31.225.163	34.347.680	37.782.447	41.560.692			0%			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	200.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000						
Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0						

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	223.729.102	246.102.012	308.314.608	297.783.435	357.935.675	114.085.975		51%			
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	162.379.000	178.616.900	196.478.590	216.126.449	237.739.094	114.085.975		47%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.745.780	22.820.358	50.204.788	27.612.633	60.747.793	15.745.025		76%			
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	40.604.322	44.664.754	49.131.230	54.044.353	59.448.788	15.745.025		53%			
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	0	0	12.500.000	0	0						
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0						
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS JALAN	96.718.994.244	76.399.204.669	74.373.436.135	92.369.898.411	118.401.199.253	36.024.716.837		37%			
Pembangunan dan Peningkatan Jalan	16.587.667.209	10.246.433.930	10.071.077.323	10.078.185.055	24.286.003.561	9.915.103.465		60%			
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	23.187.892.258	16.506.681.484	15.057.349.632	23.187.892.258	25.506.681.484	12.753.028.278		55%			
Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan	23.626.544.777	15.989.199.255	15.588.119.180	25.446.931.098	34.591.624.208	3.322.342.229		14%			
Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			0%			
Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Pelengkap Jalan	360.000.000	0	0	0	360.000.000	1.898.650		1%			
Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	20.636.318.000	20.636.318.000	20.636.318.000	20.636.318.000	20.636.318.000	12.000		0%			
Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000						
Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	12.120.572.000	12.120.572.000	12.120.572.000	12.120.572.000	12.120.572.000	924.000		0%			
Peningkatan Jalan Kabupaten (Bangub)	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	10.031.408.215					
Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000						

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN SUMBER DAYA AIR DAN JARINGAN IRIGASI	17.668.604.255	29.253.202.000	34.424.573.472	38.684.775.534	47.008.702.000	5.635.379.163		32%			
Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	1.074.160.000	1.856.600.000	2.034.300.000	2.227.700.000	2.438.400.000	266.492.690		25%			
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	1.793.353.000	4.299.800.000	6.453.503.000	7.283.900.500	8.759.700.000	399.887.816		22%			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	3.958.402.000	3.958.402.000	3.958.402.000	3.958.402.000	3.958.402.000	31.922.300		1%			
Operasi Jaringan Irigasi	498.942.255	552.100.000	595.400.000	628.700.000	659.100.000	217.793.200		44%			
Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.353.518.000	9.027.800.000	7.052.000.000	7.068.900.000	9.328.400.000	3.520.288.557		55%			
Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	3.416.141.000	7.948.500.000	12.709.968.472	15.884.073.034	20.218.200.000	1.196.619.500		35%			
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	574.088.000	1.610.000.000	1.621.000.000	1.633.100.000	1.646.500.000	2.375.100		0%			
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG DAN AMPL	46.329.309.475	57.465.510.150	66.947.055.481	84.835.357.000	72.900.789.377	8.882.067.735		19%			
Pengawasan dan Fasilitasi Bangunan Gedung	150.000.000	265.000.000	365.000.000	510.000.000	430.000.000	5.406.000		4%			
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	31.650.000.000	30.300.000.000	39.400.000.000	55.850.000.000	43.595.432.377	2.987.112.965		9%			
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK REGULER	1.738.812.000	1.738.812.000	1.738.812.000	1.738.812.000	1.738.812.000	4.777.470		0%			
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK PENUKASAN	2.719.110.000	2.719.110.000	2.719.110.000	2.719.110.000	2.719.110.000	986.980.890		36%			
Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK REGULER)	3.142.435.000	3.142.435.000	3.142.435.000	3.142.435.000	3.142.435.000	2.868.172.740		91%			
Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	369.395.000	10.400.153.150	10.381.698.481	10.475.000.000	10.575.000.000	1.889.999.975		512%			
Fasilitasi Keciptakarya	1.600.105.000	1.200.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000	2.500.000.000	47.175.093		3%			
Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi	4.959.452.475	7.700.000.000	7.700.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000	92.442.602		2%			

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KE PU AN	2.040.340.000	1.744.674.000	1.596.561.400	2.394.642.540	1.637.881.794	1.835.912.748		90%			
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke PU-an	1.605.000.000	1.366.500.000	1.209.550.000	1.943.205.000	1.156.525.500	1.531.726.583		95%			
Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	185.340.000	203.874.000	224.261.400	246.687.540	271.356.294	45.723.125		25%			
Pengadaan/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke PU - an	250.000.000	174.300.000	162.750.000	204.750.000	210.000.000	258.463.040		103%			
PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	4.897.694.860	5.387.464.346	5.926.210.781	6.518.831.859	7.170.715.045	5.667.244.281		116%			
Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	249.821.000	274.803.100	302.283.410	332.511.751	365.762.926	18.523.241		7%			
Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	154.778.800	170.256.680	187.282.348	206.010.583	226.611.641	48.200.659		31%			
Fasilitasi Informasi Tata Ruang	335.498.460	369.048.306	405.953.137	446.548.450	491.203.295	88.515.933		26%			
Fasilitasi Pengadaan Tanah	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	100.000.000		100%			
Penyusunan Dokumen Ketataruangan	275.001.100	302.501.210	332.751.331	366.026.464	402.629.111			0%			
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ke PU an	3.782.595.500	4.160.855.050	4.576.940.555	5.034.634.611	5.538.098.072	5.412.004.448		143%			
Jumlah	169.671.306.896	172.670.365.074	185.917.780.563	227.647.080.332	250.255.593.853	58.918.293.662		35%			

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2024

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	17.738.097.145	19.754.840.670	23.096.774.110	23.096.774.110	NA	16.634.826.114	NA	93,29%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	41.470.920	70.077.420	72.079.120	72.079.120	NA	36.419.220	NA	87,82%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	11.966.115	13.100.115	15.000.000	15.000.000	NA	11.723.115	NA	97,97%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	22.606.620	50.079.120	50.079.120	50.079.120	NA	18.354.120	NA	81,19%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	6.898.185	6.898.185	7.000.000	7.000.000	NA	6.341.985	NA	91,94%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	14.545.243.020	18.152.461.210	21.492.392.950	21.492.392.950	NA	13.987.863.482	NA	96,17%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	14.297.372.220	17.824.196.610	21.164.128.350	21.164.128.350	NA	13.753.327.345	NA	96,19%		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	150.970.800	231.364.600	231.364.600	231.364.600	NA	143.636.137	NA	95,14%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	NA	96.900.000	96.900.000	96.900.000	96.900.000	NA	90.900.000	NA	93,81%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	70.444.470	180.793.470	180.793.470	180.793.470	NA	43.791.195	NA	62,16%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	70.444.470	180.793.470	180.793.470	180.793.470	NA	43.791.195	NA	62,16%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	1.829.073.865	0	100.000.000	100.000.000	NA	1.387.573.773	NA	75,86%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	116.598.865	0	100.000.000	100.000.000	NA	104.854.365	NA	89,93%		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	NA	1.712.475.000	0	0	0	NA	1.282.719.408	NA	74,90%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	192.745.960	196.671.160	196.671.160	196.671.160	NA	162.467.791	NA	84,29%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	35.631.160	35.631.160	35.631.160	35.631.160	NA	33.600.770	NA	94,30%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	157.114.800	161.040.000	161.040.000	161.040.000	NA	128.867.021	NA	85,28%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	1.152.541.410	1.154.837.410	1.154.837.410	1.154.837.410	NA	1.016.710.653	NA	88,21%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	499.361.980	499.361.980	499.361.980	499.361.980	NA	387.144.424	NA	77,53%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	NA	597.703.810	599.999.810	599.999.810	599.999.810	NA	577.088.909	NA	96,55%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	38.597.620	38.597.620	38.597.620	38.597.620	NA	37.002.620	NA	95,87%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	16.878.000	16.878.000	16.878.000	16.878.000	NA	15.474.700	NA	91,69%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	NA	7.506.280.605	11.972.179.285	11.972.179.285	11.972.179.285	NA	6.605.048.936	NA	87,99%		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	NA	711.590.620	1.736.767.800	1.736.767.800	1.736.767.800	NA	702.424.884	NA	98,71%		
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	127.319.620	270.586.000	270.586.000	270.586.000	NA	121.390.384	NA	95,34%		
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	NA	584.271.000	869.623.800	869.623.800	869.623.800	NA	581.034.500	NA	99,45%		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	NA	6.794.689.985	10.235.411.485	10.235.411.485	10.235.411.485	NA	5.902.624.052	NA	86,87%		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	NA	3.915.774.485	3.958.104.485	3.958.104.485	3.958.104.485	NA	3.109.392.781	NA	79,41%		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	NA	2.175.574.500	2.845.939.000	2.845.939.000	2.845.939.000	NA	2.157.983.667	NA	99,19%		
Operasional Unit Pengelola Irigasi	NA	684.956.500	750.000.000	750.000.000	750.000.000	NA	626.449.854	NA	91,46%		
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	NA	18.384.500	0	50.000.000	50.000.000	NA	8.797.750	NA	47,85%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	NA	8.104.900.145	9.997.603.180	9.997.603.180	9.997.603.180	NA	8.091.466.855	NA	99,83%		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	NA	8.104.900.145	9.997.603.180	9.997.603.180	9.997.603.180	NA	8.091.466.855	NA	99,83%		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	1.106.246.965	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	NA	1.096.802.738	NA	99,15%		
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	6.728.653.180	6.727.603.180	6.727.603.180	6.727.603.180	NA	6.724.664.117	NA	99,94%		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	NA	270.000.000	NA	100,00%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	NA	4.738.826.115	12.002.703.405	12.002.703.405	12.002.703.405	NA	4.737.231.164	NA	99,97%		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	4.738.826.115	12.002.703.405	12.002.703.405	12.002.703.405	NA	4.737.231.164	NA	99,97%		
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	NA	4.238.826.115	4.302.703.405	4.302.703.405	4.302.703.405	NA	4.237.231.164	NA	99,96%		
Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	NA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	NA	500.000.000	NA	100,00%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	NA	45.129.549.960	12.200.000.000	28.300.000.000	20.300.000.000	NA	44.923.955.850	NA	99,54%		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	NA	45.129.549.960	12.200.000.000	28.300.000.000	20.300.000.000	NA	44.923.955.850	NA	99,54%		
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	NA	182.345.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	NA	15.245.760	NA	8,36%		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	NA	44.947.204.960	11.900.000.000	28.000.000.000	20.000.000.000	NA	44.908.710.090	NA	99,91%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	NA	45.508.507.818	27.992.284.930	32.992.284.930	32.992.284.930	NA	41.003.683.275	NA	90,10%		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	NA	45.508.507.818	27.992.284.930	32.992.284.930	32.992.284.930	NA	41.003.683.275	NA	90,10%		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	NA	400.000.000					385.168.650		96,29%		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	NA	304.891.270	0	0	0	NA	296.855.180	NA	97,36%		
Rekonstruksi Jalan	NA	14.428.420.165	0	5.000.000.000	5.000.000.000	NA	11.376.634.197	NA	78,85%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Rutin Jalan	NA	12.261.651.938	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	NA	11.796.956.318	NA	96,21%		
Penggantian Jembatan	NA	18.113.544.445	10.092.284.930	10.092.284.930	10.092.284.930	NA	17.148.068.930	NA	94,67%		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	NA	18.479.610	149.261.400	149.261.400	149.261.400	NA	18.459.610	NA	99,89%		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	NA	18.479.610	38.500.000	38.500.000	38.500.000	NA	18.459.610	NA	99,89%		
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	NA	18.479.610	38.500.000	38.500.000	38.500.000	NA	18.459.610	NA	99,89%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	NA	221.245.760	374.644.800	374.644.800	374.644.800	NA	146.049.248	NA	66,01%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	NA	94.516.075	100.000.000	100.000.000	100.000.000	NA	44.376.100	NA	46,95%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	NA	94.516.075	100.000.000	100.000.000	100.000.000	NA	44.376.100	NA	46,95%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	NA	68.339.345	200.000.000	200.000.000	200.000.000	NA	48.263.251	NA	70,62%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	NA	68.339.345	200.000.000	200.000.000	200.000.000	NA	48.263.251	NA	70,62%		

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	NA	58.390.340	74.644.800	74.644.800	74.644.800	NA	53.409.897	NA	91,47%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	NA	28.272.765	74.644.800	74.644.800	74.644.800	NA	26.035.466	NA	92,09%		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	NA	30.117.575	0	20.000.000	20.000.000	NA	27.374.431	NA	90,89%		
JUMLAH	NA	128.965.887.158	92.457.490.500	128.757.490.500	117.757.490.500	NA	122.160.721.052	NA	94,72%		

Interpretasi rasio realisasi dan anggaran pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun 2020 rasio anggaran 42% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 70,27% dengan predikat kinerja sedang.
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2020 rasio anggaran 51% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 97,18% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
3. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Jalan, pada tahun 2020 rasio anggaran 37% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 87,18% dengan predikat kinerja tinggi.
4. Program Peningkatan Layanan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi, pada tahun 2020 rasio anggaran 32% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 68,23% dengan predikat kinerja sedang.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL, pada tahun 2020 rasio anggaran 19% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 93,76% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
6. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana ke PU an, pada tahun 2020 rasio anggaran 90% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 96,40% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
7. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, pada tahun 2020 rasio anggaran 116% ini perbandingan anggaran yang tercantum dalam renstra dan realisasi anggaran pada tahun 2020. Untuk capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD mencapai 55,14% dengan predikat kinerja rendah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam menyusun strategi organisasi digunakan metode Analisis SWOT. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari *Strength* (S), *Weakness* (W), *Opportunities* (O), dan *Threats* (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran infrastruktur pekerjaan umum Kabupaten Magelang dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya kewenangan penyelenggaraan jalan/jembatan, pengelolaan irigasi oleh Dinas;
2. Adanya struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis di Wilayah yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;
3. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, peningkatan/pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi;
4. Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
5. Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
6. Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Magelang;
7. Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;

8. Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.
9. Adanya pemenuhan sarana dan prasarana ke PUan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan infrastruktur pekerjaan umum.
10. Melaksanakan amanat global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Banyaknya pemanfaatan Ruang milik jalan yang tidak sesuai keperuntukannya;
3. Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan, irigasi dan penataan ruang;
4. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor;
5. Masih terdapat ruas Jalan Kabupaten yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
6. Masih perlu peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan;
7. Masih perlu peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan;
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
9. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi
10. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
11. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
12. Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
13. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi;
14. Menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
15. Menurunnya sumber-sumber mata air untuk mengairi irigasi.

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Kabupaten Magelang untuk mengidentifikasi peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
2. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
3. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa penanganan cepat/darurat dengan aspal dingin, rehabilitasi dengan overlay, peningkatan jalan dan pelebaran jalan dengan overlay dan beton;
4. Adanya kelembagaan masyarakat sebagai pengelola SPAM dan sanitasi;
5. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
6. Unit Pelayanan Tehnis Jasa Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
7. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
8. Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
9. Masih adanya potensi sumber daya air yang belum dikelola.
10. Adanya Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Kabupaten Magelang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan revisinya, Perda Kawasan Strategis Provinsi (KSP), keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

b. Ancaman

1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);

2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan, jembatan dan irigasi;
3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
4. Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
5. Semakin meningkatnya kejadian bencana banjir, rob dan kerusakan sungai.
6. Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
7. Menurunnya potensi air baku dan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan air baku;
8. Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
9. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
10. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
2. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/ pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/ penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana ke PU an dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan dengan aspal dingin, ovelay dan *beton*;
3. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
4. Mengatasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar Kabupaten;

5. Dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
6. Mengoptimalkan penanganan ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar kolektor dengan memanfaatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
7. Mengatasi pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan menerapkan peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
8. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan dan over dimensi (lebih dari MST 8 Ton);
9. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan dan irigasi;
10. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/ jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
11. Menanggulangi masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar jalankolektor yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil dan menghindari penggunaan galian Golongan C sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
12. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
13. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
14. Mengatasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
15. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
16. Mengoptimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian mutu bahan dalam kegiatan konstruksi;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan: Pekerjaan Umum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan
		2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	a. Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah b. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi selain dari mata air dan sungai
		3. Belum optimalnya penataan bangunan gedung	Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
		4. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan	Masih rendahnya penanda ciri kawasan yang dibangun
		5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ***	Belum tercapainya layanan air minum 100%
		6. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik ***	Belum tercapainya layanan sanitasi air limbah domestik 100%
		8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Belum optimalnya penanganan genangan kawasan
		9. Belum optimalnya pengembangan permukiman	Belum optimalnya layanan penyediaan PSU Permukiman di kawasan strategis
		10. Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi	a. Sarana dan prasarana ke PU an yang belum memadai b. Belum optimalnya fungsi penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan bidang ke-PUan
		11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	a. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan rekomendasi perijinan b. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang c. Belum tersampainya informasi mekanisme pelayanan perijinan ke masyarakat
		12. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Belum optimalnya fasilitasi pembebasan tanah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedayaya Amanah”. Sedayaya dalam bahasa Jawa

mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses

pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah.

Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat. Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		
	1) Sarana dan Prasarana Publik a. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, irigasi, dan sarana ekonomi); b. Peningkatan aksesibilitas	a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan; b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	Borobudur sebagai KSPN Pariwisata Banyaknya potensi dan Sumber daya mata air di	Kendaraan tambang pasir batu dari merapi yang melebihi batas tonase maksimal Belum optimalnya peran kelembagaan pemanfaat air

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan konektivitas di seluruh wilayah kabupaten magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah	bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;		Kabupaten Magelang	
		c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya penataan bangunan gedung	Perda Bangunan Gedung	- Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah
		d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan	Tersedianya lahan untuk landmark	Masyarakat tidak mendukung pembangunan landmark
		e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	Belum optimalnya layanan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ***	Adanya kelembagaan masyarakat pada BPSAM dan BP Sanitasi	- Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air - Belum terbangunnya IPLT - Terbatasnya lahan pembangunan IPAL
		f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;	Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	Tersedianya lahan untuk pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	Masyarakat menolak adanya pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
		g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik ***	Tersedianya lahan untuk pembangunan pengolahan air limbah domestik	Masyarakat tidak mendukung adanya pembangunan pengolahan air limbah domestik
		h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan; dan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Tersedianya lahan untuk saluran drainase	Kurangnya anggaran untuk pembangunan drainase
			Belum optimalnya pengembangan permukiman	Kesadaran masyarakat untuk menata kawasan lingkungan	Kurangnya anggaran untuk penataan kawasan lingkungan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi	- UU Jasa Konstruksi - Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi	Masih rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi
			Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Adanya Pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem	Belum optimalnya standar pelayanan perijinan pemanfaatan tata ruang
			Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Tersedianya tanah untuk pembangunan	Masyarakat kurang setuju dengan harga tanah yang ditentukan oleh appresial

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder,	Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	Borobudur sebagai KSPN Pariwisata	Kendaraan tambang pasir batu dari merapi yang melebihi batas tonase maksimal
		2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi **	dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	Banyaknya potensi dan Sumber daya mata air di Kabupaten Magelang	Belum optimalnya peran kelembagaan pemanfaat air
		3. Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Fungsi Perangkat daerah:	Belum optimalnya penataan bangunan gedung	Perda Bangunan Gedung	- Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		4. Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima	a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan;	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan	Tersedianya lahan untuk landmark	Masyarakat tidak mendukung pembangunan landmark
		5. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ***	Adanya kelembagaan masyarakat pada BPSAM dan BP Sanitasi	- Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air - Belum terbangunnya IPLT - Terbatasnya lahan pembangunan IPAL
		6. Penyelesaian revisi RTRWP maupun RTRW Kab/Kota	c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	Tersedianya lahan untuk pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	Masyarakat menolak adanya pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS
			d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik ***	Tersedianya lahan untuk pembangunan pengolahan air limbah domestik	Masyarakat tidak mendukung adanya pembangunan pengolahan air limbah domestik
			e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Tersedianya lahan untuk saluran drainase	Kurangnya anggaran untuk pembangunan drainase
			f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;	Belum optimalnya pengembangan permukiman	Kesadaran masyarakat untuk menata kawasan lingkungan	Kurangnya anggaran untuk penataan kawasan lingkungan
			g. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina			

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan; h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan.	Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi	- UU Jasa Konstruksi - Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi	Masih rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi
				Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Adanya Pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem	Belum optimalnya standar pelayanan perijinan pemanfaatan tata ruang
				Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Tersedianya tanah untuk pembangunan	Masyarakat kurang setuju dengan harga tanah yang ditentukan oleh appresial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berikut faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila PD tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah			
	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bandongan, Sawangan (PPL)		Materi perencanaan RDTR lintas sektor dan lintas kewenangan	DPUPR sebagai sekretariat TKPRD/ FPRD	Belum ada ketetapan RDTR
	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perdesaan (PPL)		Materi perencanaan RDTR lintas sektor dan lintas kewenangan	DPUPR sebagai sekretariat TKPRD/ FPRD	Belum ada ketetapan RDTR
2	Perwujudan Sistem Prasarana				
	Peningkatan jalan lingkar barat Gulon-Ngawen-ke arah Pasar		Jalan yang menjadi Kewenangan belum memenuhi standart sesuai kefungsiannya	DPUPR mempunyai kewenangan jalan kabupaten	Belum adanya perencanaan teknis
3	Pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan				
	Pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan sistem sanitasi IPAL dan IPLT		Belum tercapainya pelayanan sanitasi limbah domestik masyarakat	Merupakan tujuan SDGs Tersedianya dokumen perencanaan masterplan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbangunnya IPLT • Terbatasnya lahan pembangunan IPAL

KLHS

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua (6.1)		Belum tercapainya akses universal untuk seluruh rumah tangga baik perkotaan dan pedesaan terhadap layanan air minum layak	Program penyediaan air bersih dari pusat Bisnis plan PDAM	Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air
2	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan (6.2)		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya 100% akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak. • Belum seluruh Desa/kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). • Masih adanya Desa/kelurahan yang melakukan BABS. • Belum terdapat fasilitas infrastruktur layanan air limbah sistem terpusat 	DPUPR mempunyai kewenangan dalam AMPL dan mempunyai jejaring dengan berbagai pihak yang menangani AMPL	Perkembangan permukiman yang terpencah (sprawl)
	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya fasilitas IPLT daerah • Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber air baku • Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu • Belum optimalnya manajemen pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi 	DPU PR mempunyai kewenangan dalam AMPL dan mempunyai jejaring dengan berbagai pihak yang menangani AMPL	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magelang diantaranya adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur.

Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah jalan dan jembatan, irigasi dan sumber daya air, air minum dan air limbah domestik, pembangunan gedung Pemerintah serta penataan ruang di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dari jenis dan layanan infrastruktur yang menjadi isu strategis, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus memenuhi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum tingkat kabupaten, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ^{***}, dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik ^{***}.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan dan sasaran SKPD menjadi pedoman dalam penentuan strategi dan arah kebijakan SKPD. Tujuan dan sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja SKPD. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra SKPD, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh SKPD.

4.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. **Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur** adalah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Magelang dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

4.3 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Renstra DPUPR Kab. Magelang Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Magelang adalah meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang beserta dengan indikator kerjanya. Indikator kinerja sasaran merupakan kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sedangkan indikator kinerja tujuan adalah indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir periode Renstra. Rumusan tujuan dan sasaran SKPD beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikaor Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		67.74%		68.53%	72.48%	78.16%	93.05%	93.05%
	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang		66.51%	69.90%	60.85%	63.30%	76.98%	93.42%	93.42%

Untuk melihat keterkaitan antara permasalahan dan isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah DPUPR dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan permasalahan dan isu strategis terhadap tujuan dan sasaran DPUPR Tahun 2019 – 2024

No	Isu Strategis	Tujuan OPD	Masalah Pokok OPD	Sasaran OPD
1	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur jalan	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang
2	Belum optimalnya layanan infrastruktur sumber daya air			
3	Belum optimalnya peningkatan bangunan gedung			
4	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan			
5	Belum optimalnya peningkatan layanan air minum			
6	Belum optimalnya peningkatan layanan sanitasi dan air limbah domestik			
7	Belum optimalnya peningkatan layanan sarana prasarana persampahan			
8	Belum optimalnya layanan drainase perkotaan dan lingkungan			

No	Isu Strategis	Tujuan OPD	Masalah Pokok OPD	Sasaran OPD
9	Belum optimalnya penyediaan dan penanganan infrastruktur permukiman			
10	Belum optimalnya kualitas konstruksi dan sarana prasarana ke-PUan			
11	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang			
12	Belum optimalnya penyediaan tanah untuk sarana prasarana pemerintahan dan publik			

Untuk memperjelas bagaimana indikator tersebut dibentuk dan bagaimana cara menghitungnya dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Formulasi dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPUPR Tahun 2019 - 2024

Posisi Indikator	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan: Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ditambah cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan ditambah cakupan hunian layak dan berkualitas dibagi 3	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	Data Dasar	NA	68.53%	72.48%	78.16%	93.05%	93.05%
Sasaran: Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Persen	(Cakupan Penyelenggaraan jalan ditambah cakupan pengelolaan SDA ditambah Cakupan penataan bangunan gedung ditambah Cakupan layanan air minum ditambah Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik ditambah Cakupan layanan drainase lingkungan ditambah cakupan	(Cakupan Penyelenggaraan jalan + cakupan pengelolaan SDA + Cakupan penataan bangunan gedung + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik + Cakupan layanan drainase lingkungan + cakupan	Data Dasar	NA	60.85%	63.30%	76,98%	93.42%	93.42%

Posisi Indikator	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024		
			ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan ditambah Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang)/8	ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan + Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang)/8								

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan misi kedua **“Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”**.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang terdapat pada DPUPR untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi “Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup” dijabarkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”			
MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1. Meningkatkan penyelenggaraan jalan	1. Peningkatan ketersediaan jalan 2. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan
		2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	1. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air
		3. Meningkatkan penataan bangunan gedung	1. Peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan publik 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah
		4. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya	1. Pembangunan landmark dan pembangunan kawasan perbatasan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”			
MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***	1. Peningkatan sarana air minum untuk layanan ***
		6. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik***	1. Peningkatan pembangunan sarana sanitasi air limbah domestik untuk peningkatan layanan ***
		7. Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS	1. Peningkatan layanan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		8. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1. Peningkatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan
		9. Meningkatkan pengembangan permukiman	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur permukiman
		10. Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi	1. Peningkatan layanan dan kualitas konstruksi 2. Peningkatan layanan dan kualitas sarana prasarana ke-PU-an
		11. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	1. Peningkatan fasilitasi pelayanan rekomendasi perijinan 2. Peningkatan layanan pemanfaatan ruang 3. Peningkatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”			
MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Peningkatan pelayanan informasi tata ruang
		12. Meningkatkan kinerja pertanahan	1. Peningkatan fasilitasi pembebasan tanah

Keterangan:

** : SPM sesuai dengan Kemen PUPR No 29 Tahun 2018

Tabel 5.2
Program/Kegiatan dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal

Program	Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		NA	8.104.900.145	9.805.103.130	8.700.103.130	9.074.103.130	9.074.103.130
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	NA	8.104.900.145	9.805.103.130	8.700.103.130	9.074.103.130	9.074.103.130
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	1.106.246.965	2.807.499.950	1.702.499.950	2.076.499.950	2.076.499.950
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	6.728.653.180	6.727.603.180	6.727.603.180	6.727.603.180	6.727.603.180
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	NA	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		NA	4.738.826.115	5.002.703.385	5.002.703.385	5.002.703.385	5.002.703.385
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	NA	4.738.826.115	5.002.703.385	5.002.703.385	5.002.703.385	5.002.703.385

Program	Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	NA	0	199.999.980	199.999.980	199.999.980	199.999.980
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	NA	0	0	0	0	0
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	NA	4.238.826.115	4.302.703.405	4.302.703.405	4.302.703.405	4.302.703.405
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	NA	0	0	0	0	0
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	NA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	NA	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	NA	0	0	0	0	0
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	NA	0	0	0	0	0
	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	NA	0	0	0	0	0

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, melalui implementasi strategi dan kebijakan DPUPR telah menetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 tahun mendatang. Strategi dilakukan dengan mengimplementasikan program, sedang era kebijakan ditempuh dengan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka DPUPR menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 – 2024 yaitu sebagai berikut;

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
- c. Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
- d. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- e. Operasional Unit Pengelola Irigasi
- f. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM***

3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***

- b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- d. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- e. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- f. Penyediaan Sarana Persampahan

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH***

5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***
- b. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota***
- c. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat***
- d. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- e. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman***
- f. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- g. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- h. Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- i. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

6.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- b. Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan
- c. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- d. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
- e. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- f. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- g. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- h. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
- i. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

7.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota
- b. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota
- c. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota
- d. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

8.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

9.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
- b. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

10.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- b. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- c. Rekonstruksi Jalan
- d. Rehabilitasi Jalan
- e. Pembangunan Jalan
- f. Pemeliharaan Rutin Jalan
- g. Penggantian Jembatan
- h. Rehabilitasi Jembatan
- i. Pemeliharaan rutin jembatan

11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

11.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil
- b. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

11.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- b. Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

12.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- a. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

12.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

12.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

12.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu prioritas program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan di DPUPR adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ***,
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik ***.

Yang mendukung tercapainya SPM tersebut adalah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator program sebagai berikut :

a) Program

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

b) Kegiatan

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- c. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- d. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- e. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

c) Indikator program

1. Cakupan layanan air minum
2. Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan tergetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun yang akan datang berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk DPUPR selama tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur			Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	NA %		0	NA %	128.965.887.158	72,48 %	93.365.587.408	78,16 %	93.210.727.240	93,05 %	98.788.588.010	93,05 %	98.788.588.010			
	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	%	NA %		0	NA %	128.965.887.158	63.30 %	93.365.587.408	76.98 %	93.210.727.240	93.42 %	98.788.588.010	93.42 %	98.788.588.010			
	Pekerjaan Umum dan penataan ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Cakupan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	NA %		0	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	%	NA %		0	100 %	17.738.097.145	100 %	19.972.978.782	100 %	19.906.088.415	100 %	23.071.834.500	100 %	23.071.834.500			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah disusun	dokumen	Na dokumen		0	22 dokumen	41.470.920	21 dokumen	28.499.445	21 dokumen	28.499.445	21 dokumen	28.499.445	22 dokumen	28.499.445	22 dokumen	28.499.445		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	Na Dokumen		0	2	11.966.115	2	7.499.655	2 Dokumen	7.499.655	2	7.499.655	2	7.499.655	2	7.499.655	DPUPR	KECAMATAN MUNGKID
							1		0	0 Dokumen	1									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	laporan	Na Laporan		0	15	22.606.620	15	14.999.915	15	14.999.915	15	14.999.915	15	14.999.915	15	14.999.915	DPUPR	KECAMATAN MUNGKID
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	dokumen	Na dokumen		0	4	6.898.185	4	5.999.875	4	5.999.875	4	5.999.875	4	5.999.875	4	5.999.875	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020			2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan dokumen laporan keuangan	dokumen laporan	Na dokumen laporan	0	10 dokumen laporan	14.545.243.020	10 dokumen laporan	18.347.646.820	10 dokumen laporan	18.347.646.820	10 dokumen laporan	21.513.392.905	10 dokumen laporan	21.513.392.905			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	Na bulan	0	14 bulan	14.297.372.220	14 bulan	17.998.382.265	14 bulan	17.998.382.265	14 bulan	21.164.128.350	14 bulan	21.164.128.350	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang di beri honor	orang	Na orang	0	6 orang	150.970.800	8 orang	231.364.555	8 orang	231.364.555	8 orang	231.364.555	8 orang	231.364.555	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	Na Laporan	0	10 Laporan	96.900.000	10 Laporan	117.900.000	10 Laporan	117.900.000	10 Laporan	117.900.000	10 Laporan	117.900.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	Na %	0	100 %	70.444.470	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Perjalanan dinas	kali	Na kali	0	764 kali	70.444.470	255 kali	65.000.000	255 kali	65.000.000	255 kali	65.000.000	255 kali	65.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
			2. jumlah pelaksanaan rapat	kali	Na kali		25 kali		9 kali		9 kali		9 kali		9 kali				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan aset lainnya	bidang	Na bidang	0	20 bidang	1.735.651.365	0 bidang	0	0 bidang	100.000.000	0 bidang	100.000.000	0 bidang	100.000.000			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	unit	Na unit	0	1 unit	109.188.865	0 unit	0	9 unit	100.000.000	9 unit	100.000.000	9 unit	100.000.000	DPUPR	KECAMATAN MUNGKID	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bidang tanah yang diadakan	bidang	Na bidang	0	20 bidang	1.626.462.500	0 bidang	0	0 bidang	0	0 bidang	0	0 bidang	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang Pemerintah Daerah	%	Na %	0	100%	192.745.960	100%	189.039.820	100%	189.039.820	100%	189.039.820	100%	189.039.820			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	surat	Na surat	0	4000 surat	35.631.160	4000 surat	27.999.820	4000 surat	27.999.820	4000 surat	27.999.820	4000 surat	27.999.820	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	rekening	Na Rekening	0	5 Rekening	157.114.800	5 Rekening	161.040.000	5 Rekening	161.040.000	5 Rekening	161.040.000	5 Rekening	161.040.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	unit	Na unit		0	204 unit	1.152.541.410	204 unit	1.342.792.697	204 unit	1.175.902.330	204 unit	1.175.902.330	204 unit	1.175.902.330		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	0 unit		0	91 unit	499.361.980	91 unit	671.252.379	91 unit	499.361.980	91 unit	499.361.980	91 unit	499.361.980	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat berat yang dipelihara	unit	Na unit		0	47 unit	597.703.810	47 unit	599.999.778	47 unit	599.999.810	47 unit	599.999.810	47 unit	599.999.810	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur/ perlengkapan yang dipelihara	unit	Na unit		0	Na unit	0	0 unit	0	40 unit	5.000.000	40 unit	5.000.000	40 unit	5.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	unit	Na unit		0	62 unit	38.597.620	62 unit	54.662.540	62 unit	54.662.540	62 unit	54.662.540	62 unit	54.662.540	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	unit	Na unit		0	4 unit	16.878.000	4 unit	16.878.000	4 unit	16.878.000	4 unit	16.878.000	4 unit	16.878.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	%	Na %		0	75,82 %	7.506.280.605	76,11 %	6.308.104.485	77,43 %	7.333.104.485	78,76 %	8.288.104.485	78,76 %	8.288.104.485		
			2. Cakupan Layanan Jaringan Irigasi	%	Na %		85,25 %	Na %		Na %		Na %							
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sawah beririgasi	%	Na %		0	65,88%	711.590.620	66,54 %	300.000.000	67,19 %	775.000.000	67,85%	1.225.000.000	67,85%	1.225.000.000		
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data pemetaan Daerah Irigasi yang akurat tentang Jaringan Irigasi	D.I.	Na D.I.		0	Na D.I.	127.319.620	178 D.I.	200.000.000	178 D.I.	150.000.000	178 D.I.	150.000.000	178 D.I.	150.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	Pintu Air	Na Pintu Air		0	Na Pintu Air	0	0 Pintu Air	0	3 Pintu Air	150.000.000	7 Pintu Air	300.000.000	7 Pintu Air	300.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Perencanaan konservasi mata air	dokumen	Na Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah tanggul percontohan saluran terbangun	D.I.	Na D.I.	0	1 D.I.		584.271.000	1 D.I.	100.000.000	1 D.I.	100.000.000	2 D.I.	400.000.000	2 D.I.	400.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	kali	Na kali rapat	0	0 kali rapat		0	0 kali rapat	0	6 kali rapat	75.000.000	6 kali rapat	75.000.000	6 kali rapat	75.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah rekomtek pemanfaat SDA	lokasi	Na Lokasi	0	0 lokasi		0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	Na %	0	67,38%		6.794.689.985	68,05%	6.008.104.485	68,73%	6.558.104.485	69,41%	7.063.104.530	69,41%	7.063.104.530			
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Cakupan akses sawah beririgasi	Ha	Na Ha		0 Ha			178 Ha		178 Ha		178 Ha		178 Ha		DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
			2. Penyusunan Studi dan Perencanaan untuk pembangunan irigasi dan layanan SDA	dokumen	Na Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0 Dokumen	500.000.000	0	500.000.000	0	1.005.000.000	0	1.005.000.000
			3. Jumlah bangunan irigasi yang dibangun	unit	0 unit		0 unit		0	0	unit	0	0 unit		0 unit		0 unit			
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan	Ha	Na Ha	0	Na Ha		0	0 Ha	0	120 Ha	500.000.000	120 Ha	500.000.000	120 Ha	500.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab	Ha	Na Ha	0	328 Ha			328 Ha		328 Ha		328 Ha		328 Ha		DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
			2. Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan	D.I.	Na D.I.		9 D.I.		3.915.774.485		9 D.I.	3.958.104.485		9 D.I.	3.958.104.485		9 D.I.	3.958.104.485		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp		
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Luas daerah irigasi yang dipelihara	Ha	Na Ha				1873 Ha		1873 Ha			1437 Ha		1062 Ha		1062 Ha	800.000.000	800.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		2. Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	m	Na m				597.71 m		603.71 m			609.71 m		615.71 m		615.71 m				
		3. Jumlah bangunan irigasi kondisi baik	unit	Na unit				643 unit		642 unit			650 unit		658 unit		658 unit				
		4. Jumlah D.I yang dibangun bangunan ukur	D.I.	Na D.I.				14 D.I.		14 D.I.			14 D.I.		14 D.I.		14 D.I.				
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah D.I yang dioptimalkan pengelolaannya	D.I.	Na D.I.			0	21 D.I.	684.956.500	21 D.I.	750.000.000	21 D.I.	750.000.000	21 D.I.	750.000.000	21 D.I.	750.000.000			DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1. Jumlah dokumen pedoman pola tanam	dokumen	Na Dokumen				1 Dokumen		0 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		2. Jumlah data debit D.I	%	Na %				100%		0%			0%		0%		0%				
		3. Jumlah data kinerja Jaringan irigasi	dokumen	Na Dokumen				24 Dokumen		0 Dokumen			24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen				
4. Jumlah data kerusakan yang dicatat		D.I.	Na D.I.				300 D.I.		0 D.I.			300 D.I.		300 D.I.		300 D.I.					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ***	Cakupan layanan air minum***	%	Na %			0	89.91 %	8.104.900.145	91.03 %	9.805.103.130	92.15 %	8.700.103.130	93.27 %	9.074.103.130	93.27 %	9.074.103.130					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa terbangun Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Desa	Na Desa			0	Na Desa	8.104.900.145	30 Desa	9.805.103.130	30 Desa	8.700.103.130	30 Desa	9.074.103.130	30 Desa	9.074.103.130					
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***	Jumlah pembangunan SPAM pedesaan	Desa	Na Desa			0	9 Desa	1.106.246.965	6 Desa	2.807.499.950	5 Desa	1.702.499.950	6 Desa	2.076.499.950	6 Desa	2.076.499.950			DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***	1. Jumlah BP SPAM dibina	BP	Na BP SPAM			0	20 BP SPAM		20 BP SPAM			20 BP SPAM		20 BP SPAM		20 BP SPAM	6.727.603.180	6.727.603.180	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
	2. Jumlah peningkatan SPAM pedesaan	Desa	Na Desa				20 Desa		20 Desa			20 Desa		20 Desa		20 Desa					
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan***	Jumlah perluasan SPAM pedesaan	Desa	Na Desa			0	1 Desa	270.000.000	1 Desa	270.000.000,00	1 Desa	270.000.000,00	1 Desa	270.000.000	1 Desa	270.000.000			DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	Na %		0	Na %	0	0%	39.999.715	50%	39.999.715	100%	39.999.715	100%	39.999.715			
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana persampahan yang dibangun / direhab / ditingkatkan	unit	Na unit		0	Na unit	0	0 unit	39.999.715	1 unit	39.999.715	1 unit	39.999.715	1 unit	39.999.715			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DED Sistem Pengelolaan Persampahan disusun	paket	Na Paket		0	Na Paket	0	1 Paket	24.999.935	1 Paket	24.999.935	1 Paket	24.999.935	1 Paket	24.999.935	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disupervisi	TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Na TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS		0	0 TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	0	0 TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	0	0 TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	0	0 TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	0	0 TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1. Jumlah TPST yang dibangun	unit	Na unit			Na unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
			2. Luas tanah yang dibebaskan	m2	Na m2		0	Na m2		0	Na m2	14.999.780	Na m2	14.999.780	0 m2	14.999.780	0 m2	14.999.780		
			3. Fasilitas pembangunan TPS-3R	paket	Na Paket			Na Paket		0	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		0	
		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPST yang direhabilitasi	unit	Na unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPST yang ditingkatkan	unit	Na unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana yang diadakan	unit	Na unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik ***	%	87.70 %		0	88.73 %	4.738.826.115	89.76 %	5.002.703.385	90.79 %	5.002.703.385	91.82 %	5.002.703.385	91.82 %	5.002.703.385		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IPLT yang dibangun / ditingkatkan	unit	Na unit		0	15 unit	4.738.826.115	15 unit	5.002.703.385	15 unit	5.002.703.385	15 unit	5.002.703.385	15 unit	5.002.703.385		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	1. Jumlah DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun	dokumen	Na Dokumen		0	0 Dokumen		1	0	1	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	2. Luas tanah yang di bebaskan	Ha	Na Ha		0	0 Ha	0	5000 Ha	199.999.980	0 Ha	199.999.980	0 Ha	199.999.980	0 Ha	199.999.980		
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota***	Jumlah SPALD dibangun	paket	Na paket		0	Na paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat***	Jumlah unit desa dibangun sarpras pengolahan limbah	Desa	Na Desa		0	14 Desa	4.238.826.115	14 Desa	4.302.703.405	14 Desa	4.302.703.405	14 Desa	4.302.703.405	14 Desa	4.302.703.405	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah BP SLBM dibina	BP SLBM	Na BP SLBM		0	0 BP SLBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Perumahan***	Jumlah Desa dibangun Sarana dan Prasarana Air Limbah	Desa	Na Desa		0	1 Desa	500.000.000	1 Desa	500.000.000	1 Desa	500.000.000	1 Desa	500.000.000	1 Desa	500.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana yang diadakan	Unit	Na Unit		0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah jasa pengesatan yang dilaksanakan	kali	Na kali		0	0 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun	unit	Na unit		0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang direhab/ diperluas	unit	Na unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan layanan drainase lingkungan	%	Na %	0	Na %	0	0%	0	0	39.03 %	0	100%	500.000.000	100%	500.000.000			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan yang dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi	m	Na m	0	0 m	0	0 m	0	0	0 m	0	0 m	500.000.000	0 m	500.000.000			
		Penyusunan Rencana, Kegiatan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Sistem Drainase Perkotaan disusun	dokumen	Na dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Penyusunan <i>outline plan</i> pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen tersusun <i>Outline Plan</i> pada kawasan genangan	dokumen	Na Dokumen	0	0 Dokumen	0	Na Dokumen	0	0	Na Dokumen	0	Na Dokumen	0	Na Dokumen	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi yang disupervisi	lokasi	Na lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan	orang	Na orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun, (m)	m	Na m	0	0 m	0	0 m	0	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan	m	Na m	0	0 m	0	0 m	0	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0	DPUPR	Jl. Sarwo Edhi, Vanlith
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	panjang drainase yang direhabilitasi	m	Na m	0	0 m	0	0 m	0	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0	DPUPR	Muntilan, Mungkid
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah kawasan yang dibangun drainase	km	Na km	0	0 km	0	0 km	0	0	0 km	0	0 km	0	0 km	0	0	DPUPR	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	m	Na m	0	0 m	0	0 m	0	0	0 m	0	1000 m	500.000.000	1000 m	500.000.000	DPUPR	Kabupaten Magelang	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan infrastruktur permukiman	%	Na %		0	Na %	0	0%	202.499.855	100%	202.499.855	100%	202.499.855	100%	202.499.855			
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota	Terfasilitasinya penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis	lokasi	Na lokasi		0	0 lokasi	0	0 lokasi	202.499.855	15 lokasi	202.499.855	15 lokasi	202.499.855	15 lokasi	202.499.855			
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis	lokasi	Na lokasi		0	Na lokasi	0	2 lokasi	52.500.000	2 lokasi	52.500.000	2 lokasi	52.500.000	2 lokasi	52.500.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman yang dipelihara	lokasi	Na lokasi		0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota	Pendampingan Piseuw	paket	Na Paket		0	Na Paket	0	1 Paket	149.999.855	1 Paket	149.999.855	1 Paket	149.999.855	1 Paket	149.999.855	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota	Jumlah Pembinaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang diselenggarakan	orang	Na orang		0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Cakupan Penataan Bangunan Gedung	%	Na %			Na %		99.86 %		99.93 %		100%		100%				
			2. Cakupan Pembangunan Gedung Pemerintah dan Publik	%	Na %		0	99,52 %	45.129.549.960		Na %	16.530.697.110	Na %	16.470.697.110	Na %	16.530.697.110	Na %	16.530.697.110		
			3. Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	Na %			25 %			Na %		Na %		Na %		Na %			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4. Persentase Terbangunnya Landmark	%	Na %			75 %		Na %		Na %		Na %		Na %				
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pembangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/direhab	unit	Na Unit		0	11 Unit	45.129.549.960	6 unit	16.530.697.110	6 unit	16.470.697.110	6 unit	16.530.697.110	6 unit	16.530.697.110			
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi laik fungsi yang dikeluarkan	rekomendasi	Na rekomendasi		0	0 rekomen dasi	182.345.000	3 rekomendasi dasi	209.461.110	3 rekomen dasi	209.461.110	3 rekomen dasi	209.461.110	3 rekomen dasi	209.461.110	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dibangun	gedung	Na gedung			1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
			3. Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	Na gedung		0	10 gedung	44.947.204.960	5 gedung	16.321.236.000	5 gedung	16.261.236.000	5 gedung	16.321.236.000	5 gedung	16.321.236.000			
			4. Jumlah DED gedung kantor disusun	dokumen	Na dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	%	Na %		0	Na %	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lingkungan yang ditata	dokumen	Na dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp				
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungannya disusun	dokumen	Na dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah landmark dibangun	lokasi	Na lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos	Desa	Na Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Cakupan Penyelenggaraan jalan	%	Na %			Na %		82.93 %			83.21 %		83.48 %		83.48 %						
			2. Cakupan Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan	%	Na %			95,77 %		45.508.507.818		35.110.503.50		35.102.533.70		35.585.648.386		35.585.648.386					
			3. Persentase Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan dalam Kondisi Baik	%	Na %			78,89 %															
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan kondisi baik	%	Na %	0	77,45 %	45.508.507.818	77,45 %	35.110.503.501	77,55 %	35.102.533.700	77,65 %	35.585.648.385	77,65 %	35.585.648.385							
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan disusun	dokumen	Na dokumen	0	2	400.000.000	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	4	653.114.685	4	653.114.685					DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah bidang tanah yang dilakukan sertifikasi dan diadakan	Bidang									7.900.000										
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survei disusun	UPT	Na UPT	0	6	304.891.270	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000					DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pembangunan Jalan																					
		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilebarkan/ditingkatkan	km	Na km	0	4	14.428.420.165	4	10.092.284.930	4	10.092.284.930	4	10.092.284.930	4	10.092.284.930					DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp	
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Rehabilitasi Jalan	Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap Jalan	paket	Na paket		0	Na paket	0	25 Paket	5.760.000.000	25 Paket	5.660.000.000	25 Paket	5.660.000.000	25 Paket	5.660.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara/ berkala										2.023.261.000							
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	km	Na km		0	79 km	12.261.651.938	150 km	7.000.000.000	150 km	7.000.000.000	150 km	7.000.000.000	150 km	7.000.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	jembatan								35 jembatan	26.660.000.000							
		Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	paket	Na paket		0	8 paket	18.113.544.445	2 paket	9.500.000.000	2 paket	9.500.000.000	2 paket	9.500.000.000	2 paket	9.500.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pelebaran Jembatan																		
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	jembatan	Na jembatan		0	Na Jembatan	0	2 jembatan	1.850.000.000	2 jembatan	1.850.000.000	2 jembatan	1.850.000.000	2 jembatan	1.850.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	jembatan	Na jembatan		0	Na jembatan	0	150 jembatan	738.218.571	150 jembatan	730.248.770	150 jembatan	730.248.770	150 jembatan	730.248.770	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat																		
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	%	Na %			Na %		89,92 %		94,96 %		100%		100%				
			2. Cakupan Sarana Prasarana ke PU-an	%	Na %		0	86,00 %	18.479.610		Na %	69.999.620	Na %	109.999.620	Na %	149.999.620	Na %	149.999.620		
			3. Cakupan Layanan Jasa Konstruksi	%	Na %			62,59 %			Na %		Na %		Na %		Na %			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang dilatih	orang	Na orang		0	0 orang	0	30 orang	0	30 orang	40.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	80.000.000			
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	orang	Na orang		0	0 orang	0	0 orang	0,00	25 orang	20.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	40.000.000	DPUPR	KECAMATAN MUNGKID	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi	orang	Na orang		0	0 orang	0	0 orang	0,00	25 orang	20.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	40.000.000	DPUPR	KECAMATAN MUNGKID	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SIJK yang disusun	dokumen	Na dokumen		0	4 dokumen	18.479.610	4 dokumen	69.999.620	4 dokumen	69.999.620	4 dokumen	69.999.620	4 dokumen	69.999.620			
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah buku standar satuan harga	buku	Na buku		0	45 buku	18.479.610	45 buku	20.000.000	45 buku	20.000.000	45 buku	20.000.000	45 buku	20.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Pembuatan Dokuemn Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) disusun	dokumen	Na dokumen		0	Na dokumen		1 dokumen	49.999.620	1 dokumen	49.999.620	1 dokumen	49.999.620	1 dokumen	49.999.620	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	%	Na %			25%		66,67 %		83,33 %		100%		100%				
			2. Persentase dokumen rekomendasi perijinan	%	Na %		0	45,96%	221.245.760		Na %	272.998.735	Na %	292.998.735	Na %	292.998.735	Na %	292.998.735		
			3. Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	Na %			50,87%			Na %		Na %		Na %		Na %			
		Penetapan Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan (Perda Perbup)	dokumen	Na Dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			
		Penetapan kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1. jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	dokumen	Na dokumen			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	
			2. Jumlah penetapan dokumen rencana tata ruang	dokumen	Na dokumen		0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang disusun	dokumen	Na Dokumen		0	1 Dokumen	94.516.075	2 Dokumen	144.999.205	2 Dokumen	144.999.205	2 Dokumen	144.999.205	2 Dokumen	144.999.205			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang disusun	dokumen	Na dokumen		0	1 dokumen	94.516.075	2 dokumen	144.999.205	2 dokumen	144.999.205	2 dokumen	144.999.205	2 dokumen	144.999.205	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang disusun	dokumen	Na Dokumen		0	1 Dokumen	68.339.345	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang disusun	dokumen	Na dokumen		0	1 dokumen	68.339.345	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960	1 dokumen	67.999.960	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang disusun	dokumen	Na Dokumen		0	1 Dokumen	58.390.340	1 dokumen	59.999.570	1 dokumen	79.999.570	1 dokumen	79.999.570	1 dokumen	79.999.570		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang tersusun	dokumen	Na Dokumen		0	1 Dokumen	28.272.765	1 dokumen	59.999.570	1 dokumen	59.999.570	1 dokumen	59.999.570	1 dokumen	59.999.570	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	rekomen dasi	Na rekomen dasi		0	300 rekomen dasi	30.117.575	0 rekomen dasi	0	200 rekomen dasi	20.000.000	200 rekomen dasi	20.000.000	200 rekomen dasi	20.000.000	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.Cakupan layanan kinerja pertanahan	%	Na %			Na %		100%		100%		100%		100%			49.999.090
			2. Cakupan kinerja pertanahan	%	Na %		0	50 %		0	Na %	49.999.090	Na %	49.999.090	Na %	49.999.090	Na %		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	bidang	Na bidang		0	0 bidang	0	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020			2021		2022		2023		2024		Target			Rp
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitasi penatagunaan tanah	bidang	Na bidang		0	0 bidang	0	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090	20 bidang	49.999.090	DPUPR	KABUPATEN MAGELANG
Jumlah							0		128.965.887.158		93.365.587.408		93.210.727.240		98.788.588.010		98.788.588.010		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja PD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2022 - 2024, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, DPUPR menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2022 - 2024.

Untuk indikator kinerja utama DPUPR dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja	
			2020		2021	2022	2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	67,74%	NA	68,53%	72,48%	78,16%	93,05%	93,05%
1.1	<i>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang</i>	%	66,51%	69,9%	60,85%	63,30%	76,98%	93,42%	93,42%

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada perangkat daerah. Indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang yang merujuk pada indikator program pada Bab VI dapat dilihat pada table 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
			2020		2021	2022	2023			2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	%	NA	NA	75,65	76,11	77,43	78,76	78,76	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Minum***	%	NA	NA	89,91	91,03	92,15	93,27	93,27	DPUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	NA	NA	0	0	50	100	100	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik***	%	NA	NA	88,73	89,76	90,79	91,82	91,82	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	%	NA	NA	0	0	39,03	100	100	DPUPR

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
			2020		2021	2022	2023			2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman	%	NA	NA	100	100	100	100	100	DPUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	%	NA	NA	99,80	99,86	99,93	100	100	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	NA	NA	100	100	100	100	100	DPUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	%	NA	NA	82,69	82,93	83,21	83,48	83,48	DPUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	%	NA	NA	84,88	89,92	94,96	100	100	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	NA	NA	50	66,67	83,33	100	100	DPUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	%	NA	NA	100	100	100	100	100	DPUPR

Tabel 7.3

Definisi Operasional, Formulasi dan Komponen Pembentuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang Mengacu pada RPJMD 2019-2024

No.	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target				Target Akhir
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	Ketercakupan layanan sumber daya air diperoleh dari gabungan persentase 2 komponen yaitu: persentase layanan jaringan irigasi dan persentase layanan sumber daya air	(Persentase layanan jaringan irigasi + persentase layanan sumber daya air)/2		NA	NA	75,65	76,11	77,43	78,76	78,76
		Persen			Cakupan pengelolaan sumber daya air	NA	NA	75,65	76,11	77,43	78,76	78,76
2	Cakupan Layanan Air Minum **	Persen	Ketercakupan layanan air minum diperoleh dari 2 komponen yaitu: jumlah penduduk yang terlayani air minum dan jumlah total penduduk	((Jumlah Penduduk yang terlayani air minum/jumlah total penduduk) * 100%)		NA	NA	89,91	91,03	92,15	93,27	93,27
		Persen			Cakupan layanan air minum	NA	NA	89,91	91,03	92,15	93,27	93,27
3	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	Persen	Ketersediaan cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan diperoleh dari komponen persentase ketersediaan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS dan sarana prasarana persampahan	(Persentase ketersediaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sarana prasarana persampahan)		NA	NA	0	0	50	100	100
		Persen			Cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan	NA	NA	0	0	50	100	100
4	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik **	Persen	Ketersediaan cakupan layanan sanitasi air limbah domestik diperoleh dari 2 komponen yaitu: jumlah	(Jumlah Penduduk yang terlayani air limbah domestik/ jumlah seluruh penduduk) * 100%)		NA	NA	88,73	89,76	90,79	91,82	91,82

No.	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target				Target Akhir
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
		Persen	penduduk yang terlayani air limbah domestik dan jumlah seluruh penduduk		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	NA	NA	88,73	89,76	90,79	91,82	91,82
5	Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	Persen	Ketersediaan cakupan layanan drainase lingkungan diperoleh dari 2 komponen yaitu: luas genangan yang tertangani dan rencana luas genangan yang akan ditangani	(Luas genangan yang tertangani/ rencana luas genangan yang akan ditangani) *100%		NA	NA	0	0	39,03	100	100
		Persen			Cakupan layanan drainase lingkungan	NA	NA	0	0	39,03	100	100
6	Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman	Persen	Ketercakupan layanan infrastruktur permukiman diperoleh dari komponen persentase kawasan yang terlayani infrastruktur permukiman di kawasan strategis			NA	NA	100	100	100	100	100
					Cakupan layanan infrastruktur permukiman	NA	NA	100	100	100	100	100
7	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	Persen	Ketercakupan penataan bangunan gedung diperoleh dari gabungan 2 komponen yaitu: persentase bangunan gedung pemerintah yang terbangun atau terehab dan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Persentase bangunan gedung pemerintah yang terbangun atau terehab + persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik)/2		NA	NA	99,80	99,86	99,93	100	100
		Persen			Cakupan penataan bangunan gedung	NA	NA	99,80	99,86	99,93	100	100

No.	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target				Target Akhir
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
8	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	Ketercakupan penataan bangunan dan lingkungannya diperoleh dari gabungan 2 komponen yaitu: persentase lingkungan yang tertata dan persentase landmark yang terbangun	(Persentase lingkungan yang tertata + persentase landmark yang terbangun)/2		NA	NA	100	100	100	100	100
					Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	NA	NA	100	100	100	100	100
9	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	Persen	Ketercakupan penyelenggaraan jalan diperoleh dari gabungan 2 komponen yaitu: persentase ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan dan persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan kondisi baik	(Persentase ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan kondisi baik)/2		NA	NA	82,69	82,93	83,21	83,48	83,48
		Persen			Cakupan penyelenggaraan jalan	NA	NA	82,69	82,93	83,21	83,48	83,48
10	Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	Ketercakupan layanan pengembangan jasa konstruksi diperoleh dari gabungan 2 komponen yaitu: persentase ketersediaan sarana prasarana ke PU-an dan persentase sarana prasarana ke PU-an dalam kondisi baik	(Persentase ketersediaan sarana prasarana ke PU-an + persentase sarana prasarana ke PU-an dalam kondisi baik)/2		NA	NA	84,88	89,92	94,96	100	100
				Cakupan layanan pengembangan jasa konstruksi	NA	NA	84,88	89,92	94,96	100	100	

No.	Nama Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target				Target Akhir
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
11	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	Ketersediaan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang diperoleh dari gabungan 3 komponen yaitu: persentase ketersediaan dokumen tata ruang yang telah ditetapkan,	(Persentase ketersediaan dokumen tata ruang yang telah ditetapkan + persentase dokumen rekomendasi perijinan + persentase kesesuaian tata ruang)/3		NA	NA	50	66,67	83,33	100	100
		Persen	persentase dokumen rekomendasi perijinan, dan persentase kesesuaian tata ruang		Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	NA	NA	50	66,67	83,33	100	100
12	Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	Persen	Ketersediaan cakupan layanan kinerja pertanahan diperoleh dari 3 komponen yaitu: persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan, persentase kegiatan tanah obyek reformasi agraria, dan persentase penatagunaan tanah	(Persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan + Persentase kegiatan tanah obyek reformasi agraria + Persentase penatagunaan tanah)/3		NA	NA	100	100	100	100	100
					Cakupan layanan kinerja pertanahan	NA	NA	100	100	100	100	100

Tabel 7.4
Definisi Operasional, Formulasi dan Komponen Pembentuk Indikator Program

No	Indikator Program	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target			
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang saluran irigasi kondisi baik dibandingkan dengan panjang saluran irigasi	(Panjang saluran irigasi kondisi baik/panjang saluran irigasi X 100%)	Panjang saluran irigasi sekunder kondisi baik (KM)	NA	NA	597,707	603,707	609,707	615,707
					Panjang saluran irigasi sekunder	NA	NA	887,117	887,117	887,117	887,117
2	Cakupan Bangunan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	Jumlah bangunan irigasi kondisi baik dibandingkan dengan jumlah bangunan irigasi	Jumlah bangunan irigasi kondisi baik/jumlah bangunan irigasi X 100%)	Jumlah bangunan irigasi kondisi baik	NA	NA	634	642	650	658
					Jumlah bangunan irigasi	NA	NA	827	827	827	827
3	Cakupan Akses Sawah Beririgasi	Persen	Luas areal sawah beririgasi dibandingkan dengan luas sawah	(Luas areal sawah beririgasi/luas sawah X 100%)	Luas areal sawah beririgasi	NA	NA	35662,45	35662,45	35662,45	35662,45
					Luas sawah	NA	NA				
4	Cakupan Layanan Pengelolaan Air	Persen	Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang berjalan dibandingkan dengan jumlah kelembagaan petani pengelola air	Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang berjalan/jumlah kelembagaan petani pengelola air X 100%	Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang berjalan	NA	NA	169	169	175	181
					Jumlah kelembagaan petani pengelola air	NA	NA	181	181	181	181

No	Indikator Program	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target			
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
5	Cakupan Bangunan Sistem Pengelolaan Sampah Terbangun	Persen	Jumlah bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun dibandingkan dengan target bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun	(Jumlah bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun/target bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun) X 100%)	Jumlah bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun	NA	NA	-	-	1	2
					Target bangunan sistem pengelolaan sampah terbangun	NA	NA	2	2	2	2
6	Cakupan Sanitasi Air Limbah Domestik	Persen	Jumlah KK terlayani sanitasi air limbah domestik dibandingkan dengan jumlah KK	((Jumlah KK terlayani sanitasi air limbah domestik/jumlah KK) X 100%)	Jumlah KK terlayani sanitasi air limbah domestik	NA	NA	387.611	394.075	400.638	407.248
					Jumlah KK	NA	NA	436.843	439.032	441.280	443.528
7	Cakupan Panjang Drainase Terbangun	Persen	Panjang drainase yang dibangun dibandingkan dengan target panjang drainase	((Panjang drainase yang dibangun/target panjang drainase) X 100%)	Panjang drainase yang dibangun	NA	NA	-	-	2.000	5.124
					Target panjang drainase	NA	NA	5.124	5.124	5.124	5.124
8	Cakupan Layanan Air Minum	Persen	Jumlah KK terlayani air minum dibandingkan dengan jumlah KK	((Jumlah KK terlayani air minum/jumlah KK) X 100%)	Jumlah KK terlayani air minum	NA	NA	392.766	399.651	406.640	413.679
					Jumlah KK	NA	NA	436.843	439.032	441.280	443.528

No	Indikator Program	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target			
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
9	Cakupan Pembangunan Gedung Pemerintah Dan Publik	Persen	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun dibandingkan dengan jumlah rencana pembangunan gedung pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun/Jumlah rencana pembangunan gedung pemerintah X 100%	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun	NA	NA	1461	1462	1463	1464
					Jumlah rencana pembangunan gedung pemerintah	NA	NA	1464	1464	1464	1464
10	Cakupan Bangunan Pelengkap Jalan	Persen	Jumlah jembatan memiliki lebar 5,5 m dibandingkan dengan kebutuhan jembatan kab memiliki lebar 5,5 m	(Jumlah jembatan yang memiliki lebar 5,5 m / jumlah kebutuhan jembatan kab yang memiliki lebar 5,5 m X 100%)	Jumlah jembatan yang memiliki lebar 5,5 m	NA	NA	192	193	194	195
					Jumlah kebutuhan jembatan kabupaten yang memiliki lebar 5,5 m	NA	NA	195	195	195	195
11	Cakupan Jalan Kondisi Baik	Persen	Panjang jalan kabupaten kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten	(Panjang jalan kabupaten kondisi baik/panjang jalan kabupaten X 100%)	Panjang jalan kab kondisi baik	NA	NA	775,17	775,17	776,17	777,17
					Panjang jalan kab	NA	NA	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83
12	Cakupan Bangunan Pelengkap Jalan Kondisi Baik	Persen	Jumlah jembatan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah jembatan kabupaten	((Jumlah jembatan kondisi baik/jumlah jembatan kabupaten X 100%)	Jumlah jembatan kab kondisi baik	NA	NA	350	351	352	353
					Jumlah jembatan kab	NA	NA	485	485	485	485

No	Indikator Program	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Komponen	Kondisi Awal 2020		Target			
						Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
13	Cakupan Perencanaan Tata Ruang	Persen	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dibandingkan dengan target dokumen perencanaan tata ruang	(Jumlah dokumen perencanaan tata ruang/target dokumen perencanaan tata ruang X 100%)	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	NA	NA	0	2	4	6
					Target dokumen perencanaan tata ruang	NA	NA	6	6	6	6
14	Cakupan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persen	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang dibandingkan dengan target dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	(Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang/target dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang X 100%)	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	NA	NA	0	1	2	3
					Target dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	NA	NA	3	3	3	3
15	Cakupan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dibandingkan dengan target dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	(Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang/target dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang X 100%)	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	NA	NA	0	1	2	3
					Target dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	NA	NA	3	3	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pekerjaan umum jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini tentunya tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPUPR Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan 3 (tiga) tahun terakhir masa Renstra, yaitu rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

1. Memprioritaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019 - 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi

- dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan dan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang mantap baik pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, SPAM dan sanitasi;
2. Melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an dan layanan jasa konstruksi;
3. Melakukan upaya peningkatan rekomendasi perijinan (IMB), kesesuaian tata ruang dan kinerja pertanahan yang sekarang berubah menjadi PBG dan SLF dimana proses Raperda restribusinya baru sampai pembahasan dengan Dewan.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19680511 199803 1 005